

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Pangkalan Bun, 23 Pebruari 2026

Sekretaris

Rusni Thamrin, ST

NIP. 197803082009041003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27 Aset Tetap Lainnya	
C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister	

C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	40
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.



Pangkalan Bun, 23 Pebruari 2026

Sekretaris

Husni Thahirin, ST

NIP. 197804082009041003

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp27.002.100 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp27.002.100 atau mencapai 151,85 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp17.782.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.344.070.805 atau mencapai 97,63 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp7.521.997.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp47.749.935.916 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp47.749.935.916 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.388.586.979 dan Rp45.361.348.937

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.919.499 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp10.877.582.043 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-10.875.662.544, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-10.875.662.544.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp48.419.349.643, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-10.875.662.544 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 7.820.965.705 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp45.364.652.804

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

DAFTAR TABEL

- 1 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
- 2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024
- 3 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024
- 4 Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024
- 5 Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024
- 6 Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024
- 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025
- 8 Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024
- 9 Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024
- 10 Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2025
- 11 Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024
- 12 Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024
- 13 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024
- 14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024
- 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024
- 16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024
- 17 Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	I
LAMPIRAN	II
LAMPIRAN	III
LAMPIRAN	IV
LAMPIRAN	V

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	17.782.000	27.002.100	151,85	19.679.118
JUMLAH PENDAPATAN		17.782.000	27.002.100	151,85	19.679.118
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	5.108.243.000	4.930.957.812	96,53	3.174.228.286
Belanja Barang	B.2.2	2.004.754.000	2.004.689.993	100,00	2.148.749.669
Belanja Modal	B.2.3	409.000.000	408.423.000	99,86	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		7.521.997.000	7.344.070.805	97,63	5.322.977.955



Pangkalan Bun, 23 Pebruari 2026

Sekretaris

Husni Thamrin, ST

NIP. 197306082009041003

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	1.919.499	18.817.017
Jumlah Pendapatan		1.919.499	18.817.017
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	7.299.053.144	3.174.368.716
Beban Persediaan	D.4	50.678.950	37.380.100
Beban Barang dan Jasa	D.5	767.725.167	823.086.372
Beban Pemeliharaan	D.6	1.135.953.026	1.192.654.616
Beban Perjalanan Dinas	D.7	49.315.900	95.633.781
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	1.574.855.856	1.353.278.916
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Rincian Khusus Beban dalam rangka penanganan covid-19	D.12	-	-
Jumlah Beban		10.877.582.043	6.676.402.501
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(10.875.662.544)	(6.657.585.484)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	182.018
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		-	182.018
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(10.875.662.544)	(6.657.403.466)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(10.875.662.544)	(6.657.403.466)



Pangkajene-ene, 23 Februari 2026

Sekretaris

Husni Tjandirin, ST
NIP. 197803082009041003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	48.419.349.643	49.520.085.297
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(10.875.662.544)	(6.657.403.466)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	7.820.965.705	5.556.667.812
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(3.054.696.839)	(1.100.735.654)
EKUITAS AKHIR	E.6	45.364.652.804	48.419.349.643



Pangkalan Bun, 23 Pebruari 2026

Sekretaris

Husni Thamrin, ST

NIP. 197403082009041003

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

U R A I A N	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	-	-
Piutang Perpajakan	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.9	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjual	C.12	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.14	-	-
Persediaan	C.15	-	-
Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	-	-
Jumlah Properti Investasi		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.23	44.490.307.975	-
Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
Peralatan dan Mesin	C.25	2.791.153.201	-
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
Gedung dan Bangunan	C.27	13.521.581.000	-
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.31	12.468.469	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	(13.065.574.729)	-
Aset Konsesi Jasa	C.35	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36	-	-
Jumlah Aset Tetap		47.749.935.916	-
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
Aset Tak Berwujud	C.38	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
Aset Lain-lain	C.42	12.040.000	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	(12.040.000)	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		47.749.935.916	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	2.383.314.395	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	5.272.584	-
Uang Muka dari KPPN	C.50	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	-	-

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.388.586.979	-
Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		2.388.586.979	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.53	45.361.348.937	-
JUMLAH EKUTAS		45.361.348.937	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		47.749.935.916	-

A. PENJELASAN UMUM**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis***Dasar hukum Entitas*

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Visi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah : "TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB YANG AGUNG".

Misi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah Misi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel Terciptanya peningkatan tertib administrasi perkara;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
5. Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan secara Optimal baik Internal maupun Eksternal.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga Peradilan berdasarkan Parameter objektif.
7. Terciptanya peningkatan Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan secara Akuntabel, Efektif, Efisien.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya ...
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

e. **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) **Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. **Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	17.782.000	17.782.000
Jumlah Pendapatan	17.782.000	17.782.000
Belanja		
Belanja Pegawai	5.108.243.000	5.108.243.000
Belanja Barang	2.004.754.000	2.004.754.000
Belanja Modal	409.000.000	409.000.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	7.521.997.000	7.521.997.000

Realisasi Pendapatan
Rp27.002.100

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp27.002.100 atau mencapai 151,85 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp17.782.000. Pendapatan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp27.002.100. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Realisasi kenaikan PNBPN tahun 2025 sebesar Rp.7.322.982 di banding periode yang sama pada tahun 2024, hal tersebut di sebabkan karena pada tahun 2025 terdapat tambahan sewa ruangan untuk ruang Dharmayukti, sewa kantin dan bertambahnya sewa rumah dinas karena ada mutasi hakim. dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	17.782.000	27.002.100	151,85
Jumlah	17.782.000	27.002.100	151,85

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 37,21 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	27.002.100	19.679.118	37,21
Jumlah	27.002.100	19.679.118	37,21

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA 2025 sebesar 0,00 dari TA 2024 . Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp27.002.100 dan Rp19.679.118. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 37,21 dari TA 2024 Realisasi kenaikan PNBP tahun 2025 sebesar Rp.7.322.982 di banding periode yang sama pada tahun 2024, hal tersebut di sebabkan karena pada tahun 2025 terdapat tambahan sewa ruangan untuk ruang Dharmayukti, sewa kantin dan bertambahnya sewa rumah dinas karena ada mutasi hakim.. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	27.002.100	19.679.118	37,21
Jumlah	27.002.100	19.679.118	37,21

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.632.000	19.497.100	(71,11)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	182.018	(100,00)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	21.370.100	-	-
Jumlah	27.002.100	19.679.118	37,21

Realisasi Belanja
Rp7.344.070.805

B.2 Belanja

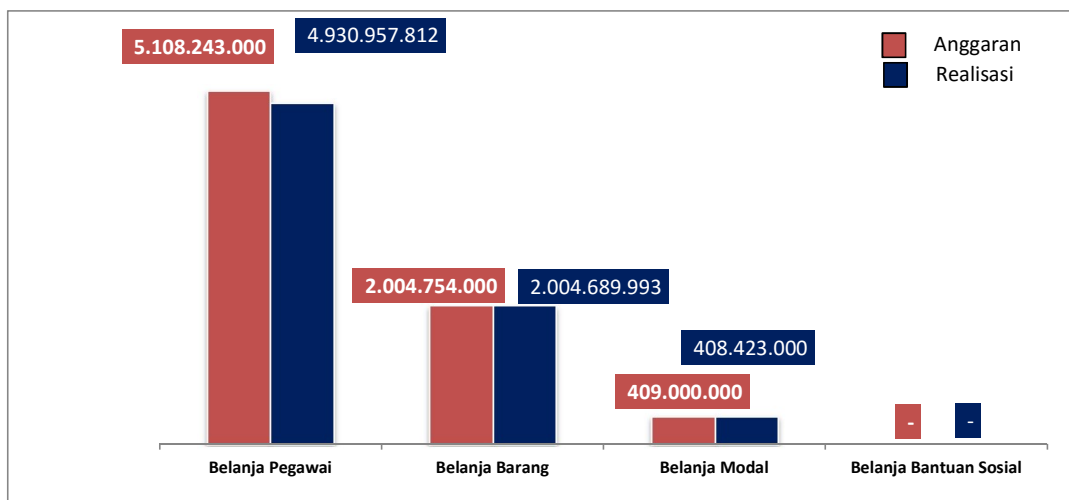
Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp7.344.070.805 atau 97,63 % dari anggaran belanja sebesar Rp.7.521.997.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	5.108.243.000	4.930.957.812	96,53
Belanja Barang	2.004.754.000	2.004.689.993	100,00
Belanja Modal	409.000.000	408.423.000	99,86
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	7.521.997.000	7.344.070.805	97,63

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 37,97% Kenaikan realisasi anggaran tahun 2025 di bandingkan periode yang sama tahun 2024 adalah Rp.2.021.092.850, hal tersebut di sebabkan karena adanya kenaikan belanja pegawai di karenakan ada nya kenaikan tunjangan hakim, dan adanya belanja modal untuk peralatan dan mesin dan belanja modal penambahan nilai gedung berupa tambah daya listrik.. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	4.930.957.812	3.174.228.286	55,34
Belanja Barang	2.004.689.993	2.148.749.669	(6,70)
Belanja Modal	408.423.000	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	7.344.070.805	5.322.977.955	37,97

*Realisasi Belanja
Pegawai
Rp4.930.957.812*

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.930.957.812 dan Rp3.174.228.286. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 55,34 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan Kenaikan belanja pegawai sebesar Rp. 1.765.449.526 di karenakan adanya kenaikan tunjangan hakim

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.490.289.160	1.252.394.720	19,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.466	16.924	20,93
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	115.591.036	99.590.800	16,07
Belanja Tunj. Anak PNS	34.808.850	27.911.600	24,71
Belanja Tunj. Struktural PNS	36.400.000	36.400.000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	224.985.000	1.209.450.000	(81,40)
Belanja Tunj. PPh PNS	6.850.458	168.361.926	(95,93)
Belanja Tunj. Beras PNS	83.789.940	68.943.840	21,53
Belanja Uang Makan PNS	252.883.000	205.381.000	23,13
Belanja Tunjangan Umum PNS	24.095.000	19.415.000	24,11
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	181.389.005	86.400.000	109,94
Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2.018.900.000	-	-
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	279.925.951	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	4.937.357.812	3.174.265.810	55,54
Pengembalian Belanja Pegawai	6.400.000	37.524	16.955,75
Jumlah Belanja	4.930.957.812	3.174.228.286	55,34

*Realisasi Belanja
Barang
Rp2.004.689.993*

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.004.689.993 dan Rp2.148.749.669. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 6,70% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Penurunan Belanja barang sebesar Rp 144.059.676 dibanding periode yang sama pada tahun 2024 di sebabkan karena adanya pemblokiran sebesar 50 % dari belanja perjalanan dinas .

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	733.795.535	814.134.180	(9,87)
Belanja Barang Non Operasional	1.000.000	6.930.000	(85,57)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	59.599.510	44.206.485	34,82
Belanja Jasa	33.946.582	3.504.192	868,74
Belanja Pemeliharaan	1.127.032.466	1.185.828.231	(4,96)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	49.315.900	95.633.781	(48,43)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2.004.689.993	2.150.236.869	(6,77)
Pengembalian Belanja	-	1.487.200	(100,00)
Jumlah Belanja	2.004.689.993	2.148.749.669	(6,70)

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2025

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

*Realisasi Belanja Modal
Rp408.423.000*

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp408.423.000 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh Pada tahun 2025 terdapat belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 212.912.000

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212.912.000	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	195.511.000	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	408.423.000	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	408.423.000	-	-

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, mengalami kenaikan sebesar 0,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Kenaikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 212.912.000 .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212.912.000	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	212.912.000	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	212.912.000	-	-

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp195.511.000 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Kenaikan Belanja penambahan nilai gedung sebesar Rp 195.511.000 berupa tambah daya dan perbaikan jaringan listrik..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	195.511.000	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	195.511.000	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	195.511.000	-	-

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 tidak ada belanja penanganan covid..

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Uang Persediaan	60.000.000	60.000.000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	60.000.000	60.000.000

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Kas di bendahara pengeluaran merupakan Uang Persediaan sebesar Rp. 60.000.000

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Belanja Dibayar Dimuka
(prepaid) Rp0

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

-

Uang Muka Belanja
(prepayment) Rp0

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :

-

Pendapatan yang Masih
Harus Diterima Rp0

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

-

C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Bukan Pajak Rp0

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Persediaan Rp0

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	-	-
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	-	-

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
2			
3			
4			
Jumlah		-	-

Persediaan yang Belum
Diregister Rp0

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Jangka Panjang
lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih-Piutang Jgk
Panjang Rp0

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Properti Investasi Rp0

C.21 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

C.21 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp44.490.307.975 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut Tidak ada kenaikan Nilai Tanah pada Tahun 2025. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Mutasi kurang :	-
Transfer Keluar	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	7.990	Jl. Sutan Syahrir No. 16 Pangkalan Bun	35.014.578.000
2	10.000	Kecamatan Pangkut	569.600.000
3	1.364	Jl. Jend. Sudirman Pangkalan Bun	1.377.585.000
4	2.016	Jl. Sudirman, SH	1.960.399.000
5	2.960	Jl. Achmad Wongso	2.980.217.000
6	1.350	Jl. Sutan Syahrir Gg. Lombok	1.373.031.000
7	900	Jl. Abdullah Mahmud	989.009.000
Jumlah			44.490.307.775

Penjelasan tentang kondisi Tanah

1. Terdapat sewa tanah negara seluas 48 m2 oleh Bapak Chanro Simamora, SH yang bertindak atas nama Koperasi PPDK Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa dan Serah terima barang tanggal 17 Oktober 2024, Surat persetujuan KPKNL Nomor S-26/MK.6/KNL.1202/2024 tanggal 3 september 2024 dan SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1223/SEK/SK.PL1.2/IX/2024 tanggal 23 September 2024 dengan nilai sewa Rp.1.324.000,- dan jangka waktu 1 tahun mulai dari 17 Oktober 2024 sampai dengan 16 Oktober 2025.
2. Terdapat sewa Ruang kerja seluas 13 m2 oleh Ibu Yosita Nurul Hikmah Dilli yang bertindak atas nama Ketua Dharmayukti Cabang Pangkalan Bun Sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa dan Serah terima barang tanggal 25 September 2024, Surat persetujuan KPKNL Nomor S-27/MK.6/KNL.1202/2024 tanggal 3 september 2024 dan SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1224/SEK/SK.PL1.2/IX/2024 tanggal 23 September 2024 dengan nilai sewa Rp.609.000,- dan jangka waktu 1 tahun mulai dari 25 September 2024 sampai dengan 24 September 2025.
3. Terdapat tambahan aset berupa tanah yang berasal dari Hibah Kabupaten Sukamara dengan NPHD Nomor 1454/SEK.W16-U3/PL1.2.4/XI/2024 dan Persetujuan Hibah dari Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 3274/SEK/PL1.2.4/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 dengan luas tanah 6.524 m2 dengan Nilai Rp. 225.888.775

*Tanah Belum Diregister
Rp0*

C.24 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Peralatan dan Mesin
Rp2.791.153.201*

C.25 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp2.791.153.201 dan Rp0. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025		-
Mutasi tambah:		
Pembelian		-
Hibah (Masuk)		-
		-
		-
		-
		-
		-
Mutasi Kurang:		
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Saldo per 31 Desember 2025		-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025		(2.343.214.901)
Nilai Buku per 31 Desember 2025		(2.343.214.901)

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- a. Tidak ada Mutasi Tambah Peralatan Dan Mesin pada Tahun 2024
- b.
- c.
- d.

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Tidak ada Mutasi Kurang Peralatan Dan Mesin pada Tahun 2024
-
-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0

C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan
Rp13.521.581.000

C.27 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp13.521.581.000 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Hibah (Masuk)	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(10.722.359.828)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	(10.722.359.828)

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak ada Mutasi Tambah Gedung Dan Bangunan pada Tahun 2024

- -

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak ada Mutasi Kurang Gedung Dan Bangunan pada Tahun 2024

- -

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0

C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0

C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	-
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
Nilai Buku per	-

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- -

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- -

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp0

C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya Rp12.468.469

C.31 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.12.468.469 dan Rp.0. Aset tetap tersebut Aset Tetap Lainnya yang terdapat di Satker Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah berupa buku di perpustakaan.. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Mutasi tambah/kurang:

Tidak ada mutasi tambah maupun kurang pada Aset Tetap Lainnya

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0

C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp13.065.574.729

C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp13.065.574.729 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.791.153.201	(2.343.214.901)	447.938.300
2	Gedung dan Bangunan	13.521.581.000	(10.722.359.828)	2.799.221.172
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	12.468.469	-	12.468.469
Akumulasi Penyusutan		16.325.202.670	(13.065.574.729)	3.259.627.941

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Aset Konsepsi Jasa Rp0

C.35 Aset Konsepsi Jasa

Saldo Aset Konsepsi Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Aset Konsepsi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsepsi dalam suatu perjanjian konsepsi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disediakan oleh pemberi konsepsi. Rincian Aset Konsepsi Jasa per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Konsepsi Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Kemitraan Dengan
Pihak Ketiga Rp0

C.37 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Unaudited) Tahun 2025

No	U r a i a n	Jumlah
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Aset Tak Berwujud Rp0

C.38 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berupa Tidak ada Aset Tak Berwujud Pada Satker Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
	-
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

- a. -
- b. -

Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan Rp0

C.39 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya Rp0

C.40 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
Dana Lainnya	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

-

C.41 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

-

C.42 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp12.040.000 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	(12.040.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	(12.040.000)

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

-	-
-	-
-	-

Mutasi Kurang

-	-
-	-
-	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang
Belum Diregister Rp0

C.43 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya 12.040.000

C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp12.040.000 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	12.040.000	(12.040.000)	-
-	-	-	-
Total	12.040.000	(12.040.000)	-

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp2.383.314.395

C.45 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.383.314.395 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0

C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Hibah Yang Belum Disahkan Rp0

C.47 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0

C.48 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

Pendapatan Diterima Dimuka Rp5.272.584

C.49 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.272.584 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

berasal dari gedung yang disewakan dengan pembayaran di awal kontrak

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.50 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

C.51 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

jkhkjhgjcgjhgjghckj

Kewajiban Konsesi Jasa Rp0

C.52 Kewajiban Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang muncul karena adanya perolehan aset konsesi jasa.

Rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

-

Ekuitas Rp45.361.348.937

C.53 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp45.361.348.937. dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 54 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp1.919.499

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.919.499 dan Rp18.817.017. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 89,80. Hal tersebut disebabkan oleh Pendapatan Negera Bukan Pajak Tahun Anggaran 2024 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Berasal dari : 1. Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan yaitu berupa sewa rumah dinas sebesar Rp. 18.817.017. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.919.499	18.817.017,00	(89,80)
Pendapatan Ongkos Perkara	-	-	-
Jumlah	1.919.499,00	18.817.017,00	(89,80)

Beban Pegawai
Rp7.299.053.144

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.299.053.144 dan Rp3.174.368.716.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 129,94 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Kenaikan belanja pegawai sebesar Rp. 123.055.439 di karenakan adanya kenaikan tunjangan hakim . Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.493.594.860	1.252.520.020	19,25
Beban Pembulatan Gaji PNS	20.376	16.494	23,54
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	115.921.606	99.603.330	16,38
Beban Tunj. Anak PNS	34.878.880	27.914.106	24,95
Beban Tunj. Struktural PNS	36.400.000	36.400.000	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	224.985.000	1.209.450.000	(81,40)
Beban Tunj. PPh PNS	6.914.487	168.361.926	(95,89)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	7.299.053.144	3.174.368.716	129,94

D.4 **Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp50.678.950 dan Rp37.380.100

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 35,58 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan sebesar Rp 13.250.680 atau 26,17 % di bandingkan periode yang sama Tahun 2023 adalah karena masih terdapat Stock barang persediaan di tahun 2023 sehingga pemenuhan belanja barang sudah terpenuhi.. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	50.678.950	37.380.100	35,58
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	50.678.950,00	37.380.100	35,58

D.5 **Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp767.725.167 dan Rp823.086.372.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 6,73 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan beban barang dan jasa sebesar 4,02 di bandingkan periode yang sama Tahun 2023 adalah karena banyak penyesuaian pada tahun 2024 banyak penyesuaian anggaran, seperti honor operasional satuan kerja hanya di berikan sebesar 40 % dari SBU.. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Langganan Telepon	1.367.882	1.362.642	0,38
Beban Keperluan Perkantoran	618.387.555	720.616.630	(14,19)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12.600.000	11.038.500	14,15
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	59.520.000	46.993.600	26,66
Beban Barang Operasional Lainnya	43.287.980	33.998.250	27,32
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Langganan Air	221.750	1.126.750	(80,32)
Beban Sewa	32.340.000	1.020.000	3.070,59
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	6.930.000	(100,00)
Jumlah	767.725.167	823.086.372,00	(6,73)

Beban Pemeliharaan
Rp1.135.953.026

D.6 **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.135.953.026 dan Rp1.192.654.616.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 4,75 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Kenaikan beban pemeliharaan sebesar 2,14 % disebabkan adanya beberapa pekerjaan pemeliharaan yang pada tahun 2023 tidak di lakukan akan tetapi dilakukan pemeliharaan di tahun 2024 seperti perbaikan atas berupa pengecatan. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	825.140.800	877.856.400	(6,01)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	158.986.500	159.000.000	(0,01)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	8.920.560	6.826.385	30,68
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	142.905.166	148.971.831	(4,07)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	1.135.953.026	1.192.654.616	(4,75)

Beban Perjalanan Dinas
Rp49.315.900

D.7 **Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp49.315.900 dan Rp95.633.781

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 48,43 persen disebabkan oleh Kenaikan realisasi beban perjalanan dinas disebabkan karena kegiatan perjalanan dinas banyak di lakukan secara offline. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	49.315.900	95.633.781	(48,43)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	49.315.900,00	95.633.781	(48,43)

Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0

D.8 **Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Bantuan Sosial
Rp0*

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp1.574.855.856*

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.574.855.856 dan Rp1.353.278.916.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	131.456.700	108.163.600	21,54
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.443.399.156	1.245.115.316	15,92
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumah Penyusutan	1.574.855.856	1.353.278.916	16,37
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	1.574.855.856	1.353.278.916	16,37

D.11 **Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.12 **Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar**

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.13 **Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang**

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya Rp0

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp182.018.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	182.018,00	(100,00)
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	182.018	(100,00)

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :
Tidak ada Pos Luar Biasa di TW III Tahun Anggaran 2024

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

0

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.48.419.349.643,00

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.48.419.349.643,00 dan Rp.49.520.085.297,00

Defisit LO
Rp.10.875.662.544,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.10.875.662.544,00 dan Rp.6.657.403.466,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0.00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset
Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. .

Koreksi ini

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas Rp7.820.965.705

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.7.820.965.705 dan Rp.5.556.667.812. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	7.352.790.805
Diterima dari Entitas Lain	(27.002.100)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	495.177.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	7.820.965.705

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 7.352.790.805, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 27.002.100

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Printer (Peralatan personal komputer)	Badan Peradilan Umum MARI	5.600.000
Scanner (Peralatan personal komputer)	Badan Peradilan Umum MARI	21.880.000
Jumlah		27.480.000

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 225.888.975 dari total Rp225.888.975 yang akan diterima sepanjang tahun 2025

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
Kabupaten Sukamara	Tanah	225.888.975
-	-	-
Total Pengesahan		225.888.975,00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		225.888.975

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran

Ekuitas Akhir
Rp45.364.652.804

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.45.364.652.804,00 dan Rp.48.419.349.643,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

1. Pendapatan Sewa Tanah Rp. 3.737.167
2. Pendapatan sewa Raung DYK Rp. 1.535.417
3. Belanja Pegawai Yang masih harus dibayar Rp. 2.368.583.690
4. Belanja Listrik Rp. 14.953.967
5. Belanja Telephon Rp. 114.666
6. Belanja PDAM Rp. 10.000

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Bagian anggaran 01 Badan Urusan Administrasi adalah

1. BRI CABANG PANGKALAN BUN Nomor VA 653240991341000 a.n. BPG 102 PN PANGKALAN BUN yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0 Persetujuan kembali atas pembukaan rekening Pengadilan Negeri Pangkalan Bun di keluarkan oleh Kepala KPPN Pangkalan Bun No.S-860/WPG.18/Kp.102/2015 Tanggal. 30-07-2015

F.2.4. Pengelolaan Keuangan Perkara Dan uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya yang perlu di sampaikan dalam laporan ini.

LAMPIRAN

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1400) KALIMANTAN TENGAH
SATUAN KERJA : (099134) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Tgl Data : 27/02/26 7:41 AM

Tgl Cetak : 27/02/26 2:17 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	23,289,599	18,817,017	4,472,582	23.769
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	23,289,599	18,817,017	4,472,582	23.769
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	23,289,599	18,817,017	4,472,582	23.769
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	7,307,773,144	3,174,368,716	4,133,404,428	130.212
Beban Persediaan	50,678,950	37,380,100	13,298,850	35.577
Beban Barang dan Jasa	783,679,134	823,086,372	(39,407,238)	(4.788)
Beban Pemeliharaan	1,135,953,026	1,192,654,616	(56,701,590)	(4.754)
Beban Perjalanan Dinas	49,315,900	95,633,781	(46,317,881)	(48.433)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1400) KALIMANTAN TENGAH
SATUAN KERJA : (099134) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Tgl Data : 27/02/26 7:41 AM

Tgl Cetak : 27/02/26 2:17 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,574,855,856	1,353,278,916	221,576,940	16.373
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	10,902,256,010	6,676,402,501	4,225,853,509	63.295
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(10,878,966,411)	(6,657,585,484)	(4,221,380,927)	63.407
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	182,018	(182,018)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	182,018	(182,018)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	182,018	(182,018)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(10,878,966,411)	(6,657,403,466)	(4,221,562,945)	63.412
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(10,878,966,411)	(6,657,403,466)	(4,221,562,945)	63.412

Keterangan :
FINAL

Pangkalan Bun, 27 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



HUSNI THAMRIN, ST
Pembina / N / a 107803082009041003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1400) KALIMANTAN TENGAH
SATUAN KERJA : (099134) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Tgl Data : 27/02/26 12:39 PM
Tgl Cetak : 27/02/26 2:17 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	48,419,349,643	49,520,085,297	(1,100,735,654)	(2.22)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(10,878,966,411)	(6,657,403,466)	(4,221,562,945)	63.41
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	7,820,965,705	5,556,667,812	2,264,297,893	40.75
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(3,058,000,706)	(1,100,735,654)	(1,957,265,052)	177.81
EKUITAS AKHIR	45,361,348,937	48,419,349,643	(3,058,000,706)	(6.32)

Keterangan :

FINAL

Pangkalan Bun, 27 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran
HUSNIDHAMRIN, ST
Pembina / Nya 097803082009041003



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN 099134

Tgl Data : 27/02/26 7:41 AM
Tgl Cetak : 27/02/26 2:17 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	17,628,000	27,002,100	9,374,100	153.18	17,782,000	19,679,118	1,897,118	110.67
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	17,628,000	27,002,100	9,374,100	153.18	17,782,000	19,679,118	1,897,118	110.67
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	17,628,000	27,002,100	9,374,100	153.18	17,782,000	19,679,118	1,897,118	110.67
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	7,521,997,000	7,352,790,805	(169,206,195)	97.75	5,328,182,000	5,322,977,955	(5,204,045)	99.9
1. Belanja Pegawai	5,108,243,000	4,939,677,812	(168,565,188)	96.70	3,177,060,000	3,174,228,286	(2,831,714)	99.91
2. Belanja Barang	2,004,754,000	2,004,689,993	(64,007)	100.00	2,151,122,000	2,148,749,669	(2,372,331)	99.89
3. Belanja Modal	409,000,000	408,423,000	(577,000)	99.86	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN 099134

Tgl Data : 27/02/26 7:41 AM
Tgl Cetak : 27/02/26 2:17 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	7,521,997,000	7,352,790,805	(169,206,195)	97.75	5,328,182,000	5,322,977,955	(5,204,045)	99.9
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Pangkalan Bun, 27 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

HUSNATHAMRIN, ST
Pembina / NIP. 197803082009041003



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1400) KALIMANTAN TENGAH

SATUAN KERJA : (099134) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Tgl Data : 27/02/26 7:41 AM

Tgl Cetak : 27/02/26 2:17 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET TETAP				
Tanah	44,490,307,975	44,490,307,975	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,791,153,201	2,360,348,201	430,805,000	18.25
Gedung dan Bangunan	13,521,581,000	13,048,786,000	472,795,000	3.62
Aset Tetap Lainnya	12,468,469	12,468,469	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(13,065,574,729)	(11,490,718,873)	(1,574,855,856)	13.71
JUMLAH ASET TETAP	47,749,935,916	48,421,191,772	(671,255,856)	(1.39)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	12,040,000	12,040,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(12,040,000)	(12,040,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	47,749,935,916	48,421,191,772	(671,255,856)	(1.39)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	2,383,314,395	282,046	2,383,032,349	844,909.11
Pendapatan Diterima Dimuka	5,272,584	1,560,083	3,712,501	237.97
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,388,586,979	1,842,129	2,386,744,850	129,564.48
JUMLAH KEWAJIBAN	2,388,586,979	1,842,129	2,386,744,850	129,564.48
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	45,361,348,937	48,419,349,643	(3,058,000,706)	(6.32)
JUMLAH EKUITAS	45,361,348,937	48,419,349,643	(3,058,000,706)	(6.32)
JUMLAH EKUITAS	45,361,348,937	48,419,349,643	(3,058,000,706)	(6.32)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	47,749,935,916	48,421,191,772	(671,255,856)	(1.39)

Keterangan :

FINAL

Pangkalan Bun, 27 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Penguasa Anggaran



HUSNA HAMRIN, ST
Pembina / IV a / 197803082009041003

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1400) KALIMANTAN TENGAH

SATUAN KERJA : (099134) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Tgl Data : 27/02/26 7:41 AM

Tgl Cetak : 27/02/26 2:17 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	131111	Tanah	44,490,307,975	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,791,153,201	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	13,521,581,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	12,468,469	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,343,214,901
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	10,722,359,828
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	12,040,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	12,040,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	2,368,235,762
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	15,078,633
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	5,272,584
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	7,352,790,805
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	27,002,100	0
0.0	391111	Ekuitas	0	48,419,349,643
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	495,177,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,919,499
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	21,370,100
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,493,594,860	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	20,376	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	115,921,606	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	34,878,880	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	36,400,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	224,985,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	6,914,487	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	83,789,940	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	252,883,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	24,095,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	181,389,005	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	828,451,044	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	3,828,300,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	132,102,000	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,778	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,361,280	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	2,173,808	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	8,980,080	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	35,811,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	8,720,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	618,387,555	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1400) KALIMANTAN TENGAH

SATUAN KERJA : (099134) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Tgl Data : 27/02/26 7:41 AM

Tgl Cetak : 27/02/26 2:17 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,600,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	59,520,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	43,287,980	0
3.0	521211	Beban Bahan	300,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	14,953,967	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,367,882	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	221,750	0
3.0	522141	Beban Sewa	32,340,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	825,140,800	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	158,986,500	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	142,905,166	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	49,315,900	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	131,456,700	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,443,399,156	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	50,678,950	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	8,920,560	0
JUMLAH			71,756,808,755	71,756,808,755

Keterangan :

FINAL



Pangkalan Bun, 27 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

HUSNI THAMRIN, ST

Pembina / NIP. 197803082009041003

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1400) KALIMANTAN TENGAH

SATUAN KERJA : (099134) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Tgl Data : 27/02/26 12:39 PM

Tgl Cetak : 27/02/26 2:18 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	7,352,790,805
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	27,002,100	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	5,632,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	21,370,100
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,490,289,160	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20,466	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	115,591,036	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	34,808,850	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	36,400,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	224,985,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	6,850,458	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	83,789,940	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	252,883,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	24,095,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	181,389,005	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	279,925,951	0
3.0	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2,018,900,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	132,102,000	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,778	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,361,280	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2,173,808	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8,980,080	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	35,811,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	8,720,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	618,387,555	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,600,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	59,520,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	43,287,980	0
3.0	521211	Belanja Bahan	300,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	59,599,510	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,367,332	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	239,250	0
3.0	522141	Belanja Sewa	32,340,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	825,140,800	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	158,986,500	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	142,905,166	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49,315,900	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1400) KALIMANTAN TENGAH

SATUAN KERJA : (099134) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Tgl Data : 27/02/26 12:39 PM

Tgl Cetak : 27/02/26 2:18 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212,912,000	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	195,511,000	0
3.1	511339	Pengembalian Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	0	6,400,000
JUMLAH			7,386,192,905	7,386,192,905

Keterangan :

FINAL

Pangkalan Bun, 27 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Klausea Penguasa Anggaran

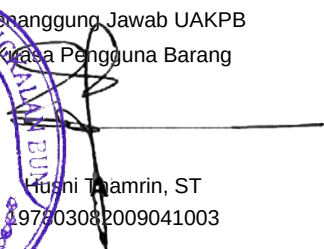
HUSNI THAMRIN, ST
197803082009041003

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099134 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Tgl.Data : 27/02/26 12:39 PM
Tgl.Cetak : 27/02/26 2:21 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
131111	Tanah	44,490,307,975
132111	Peralatan dan Mesin	2,791,153,201
133111	Gedung dan Bangunan	13,521,581,000
135121	Aset Tetap Lainnya	12,468,469
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2,343,214,901)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(10,722,359,828)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	12,040,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(12,040,000)
J U M L A H		47,749,935,916

Pangkalan Bun, 27 Februari 2026
Peranggung Jawab UAKPB
Klasa Pengguna Barang

Husni Thamrin, ST
197803082009041003



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099134 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Tgl Data : 27/02/26 12:39 PM
Tanggal : 27/02/26 2:21 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_skel_satker_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pangkalan Bun, 27 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Husni Thamrin, ST
197803082009041003

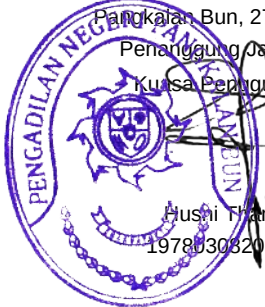
**LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099134 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Tgl Data : 27/02/26 12:39 PM
Tgl Cetak : 27/02/26 2:20 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_skel_satker_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		1,024	49,013,200	1	700,000	0	0	1,025	49,713,200
3050201	MEUBELAIR	-	20	11,221,000	1	700,000	0	0	21	11,921,000
3050204	ALAT PENDINGIN	-	8	1,860,000	0	0	0	0	8	1,860,000
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	-	320	23,935,000	0	0	0	0	320	23,935,000
3180102	RAMBU TIDAK BERSUAR	-	676	11,997,200	0	0	0	0	676	11,997,200
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		1	100,000	0	0	0	0	1	100,000
3050201	MEUBELAIR	-	1	100,000	0	0	0	0	1	100,000
TOTAL				49,113,200		700,000		0		49,813,200

Pangkalan Bun, 27 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kusa Pengguna Barang
Husni Hamrin, ST
197803082009041003



**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099134 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Tgl Data : 27/02/26 12:39 PM
Tgl Cetak : 27/02/26 2:20 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_skel_satker_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		33,105	44,490,307,975	24,515	35,810,066,975	24,515	35,810,066,975	33,105	44,490,307,975
2010101	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	-	8,590	8,680,241,000	0	0	0	0	8,590	8,680,241,000
2010104	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	-	24,515	35,810,066,975	24,515	35,810,066,975	24,515	35,810,066,975	24,515	35,810,066,975
132111	Peralatan dan Mesin		1,508	2,409,361,401	41	431,505,000	0	0	1,549	2,840,866,401
3020102	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	-	3	262,514,828	0	0	0	0	3	262,514,828
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	-	6	63,570,000	0	0	0	0	6	63,570,000
3020202	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	-	1	3,000,000	0	0	0	0	1	3,000,000
3050101	MESIN KETIK	-	2	9,000,000	0	0	0	0	2	9,000,000
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	-	61	120,686,000	0	0	0	0	61	120,686,000
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	-	11	53,648,100	0	0	0	0	11	53,648,100
3050201	MEUBELAIR	-	199	262,131,000	24	139,450,000	0	0	223	401,581,000
3050203	ALAT PEMBERSIH	-	1	2,750,000	0	0	0	0	1	2,750,000
3050204	ALAT PENDINGIN	-	31	118,641,830	12	182,609,000	0	0	43	301,250,830
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	-	402	167,430,900	3	98,901,000	0	0	405	266,331,900
3050299	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA	-	3	3,798,000	0	0	0	0	3	3,798,000
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	-	9	49,228,000	1	1,720,500	0	0	10	50,948,500
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	-	2	63,006,000	1	8,824,500	0	0	3	71,830,500
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	-	2	9,150,000	0	0	0	0	2	9,150,000
3060347	SUMBER TENAGA	-	2	132,800,000	0	0	0	0	2	132,800,000
3100101	KOMPUTER JARINGAN	-	3	118,165,000	0	0	0	0	3	118,165,000
3100102	PERSONAL KOMPUTER	-	51	654,790,120	0	0	0	0	51	654,790,120
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	-	35	136,527,833	0	0	0	0	35	136,527,833
3100204	PERALATAN JARINGAN	-	8	166,526,590	0	0	0	0	8	166,526,590
3180102	RAMBU TIDAK BERSUAR	-	676	11,997,200	0	0	0	0	676	11,997,200
133111	Gedung dan Bangunan		13	13,048,786,000	4	10,321,693,000	2	9,848,898,000	15	13,521,581,000
4010101	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	-	2	9,848,898,000	0	0	2	9,848,898,000	0	0
4010108	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	-	1	212,523,000	0	0	0	0	1	212,523,000
4010111	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	-	0	0	1	196,344,000	0	0	1	196,344,000
4010113	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	-	0	0	1	80,940,000	0	0	1	80,940,000
4010124	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	-	0	0	2	10,044,409,000	0	0	2	10,044,409,000
4010201	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	-	4	1,270,707,000	0	0	0	0	4	1,270,707,000
4010202	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	-	6	1,716,658,000	0	0	0	0	6	1,716,658,000
135121	Aset Tetap Lainnya		4,179	12,468,469	0	0	0	0	4,179	12,468,469
6010101	BUKU	-	4,179	12,468,469	0	0	0	0	4,179	12,468,469
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		6	12,140,000	0	0	0	0	6	12,140,000
3020302	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	-	1	9,975,000	0	0	0	0	1	9,975,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099134 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Tgl Data : 27/02/26 12:39 PM
Tgl Cetak : 27/02/26 2:20 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_gab_skel_satker_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050201	MEUBELAIR	-	5	2,165,000	0	0	0	0	5	2,165,000
TOTAL				59,973,063,845		46,563,264,975		45,658,964,975		60,877,363,845

Pangkalan Bun, 27 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuska Pengguna Barang

Husni Thahirin, ST
197803032009041003

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099134 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Tgl Data : 27/02/26 12:39 PM
Tanggal : 27/02/26 2:20 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_skel_satker_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		33,105	44,490,307,975	24,515	35,810,066,975	24,515	35,810,066,975	33,105	44,490,307,975
2010101	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	-	8,590	8,680,241,000	0	0	0	0	8,590	8,680,241,000
2010104	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	-	24,515	35,810,066,975	24,515	35,810,066,975	24,515	35,810,066,975	24,515	35,810,066,975
132111	Peralatan dan Mesin		484	2,360,348,201	40	430,805,000	0	0	524	2,791,153,201
3020102	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	-	3	262,514,828	0	0	0	0	3	262,514,828
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	-	6	63,570,000	0	0	0	0	6	63,570,000
3020202	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	-	1	3,000,000	0	0	0	0	1	3,000,000
3050101	MESIN KETIK	-	2	9,000,000	0	0	0	0	2	9,000,000
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	-	61	120,686,000	0	0	0	0	61	120,686,000
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	-	11	53,648,100	0	0	0	0	11	53,648,100
3050201	MEUBELAIR	-	179	250,910,000	23	138,750,000	0	0	202	389,660,000
3050203	ALAT PEMBERSIH	-	1	2,750,000	0	0	0	0	1	2,750,000
3050204	ALAT PENDINGIN	-	23	116,781,830	12	182,609,000	0	0	35	299,390,830
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	-	82	143,495,900	3	98,901,000	0	0	85	242,396,900
3050299	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA	-	3	3,798,000	0	0	0	0	3	3,798,000
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	-	9	49,228,000	1	1,720,500	0	0	10	50,948,500
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	-	2	63,006,000	1	8,824,500	0	0	3	71,830,500
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	-	2	9,150,000	0	0	0	0	2	9,150,000
3060347	SUMBER TENAGA	-	2	132,800,000	0	0	0	0	2	132,800,000
3100101	KOMPUTER JARINGAN	-	3	118,165,000	0	0	0	0	3	118,165,000
3100102	PERSONAL KOMPUTER	-	51	654,790,120	0	0	0	0	51	654,790,120
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	-	35	136,527,833	0	0	0	0	35	136,527,833
3100204	PERALATAN JARINGAN	-	8	166,526,590	0	0	0	0	8	166,526,590
133111	Gedung dan Bangunan		13	13,048,786,000	4	10,321,693,000	2	9,848,898,000	15	13,521,581,000
4010101	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	-	2	9,848,898,000	0	0	2	9,848,898,000	0	0
4010108	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	-	1	212,523,000	0	0	0	0	1	212,523,000
4010111	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	-	0	0	1	196,344,000	0	0	1	196,344,000
4010113	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	-	0	0	1	80,940,000	0	0	1	80,940,000
4010124	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	-	0	0	2	10,044,409,000	0	0	2	10,044,409,000
4010201	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	-	4	1,270,707,000	0	0	0	0	4	1,270,707,000
4010202	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	-	6	1,716,658,000	0	0	0	0	6	1,716,658,000
135121	Aset Tetap Lainnya		4,179	12,468,469	0	0	0	0	4,179	12,468,469
6010101	BUKU	-	4,179	12,468,469	0	0	0	0	4,179	12,468,469
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		5	12,040,000	0	0	0	0	5	12,040,000
3020302	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	-	1	9,975,000	0	0	0	0	1	9,975,000
3050201	MEUBELAIR	-	4	2,065,000	0	0	0	0	4	2,065,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

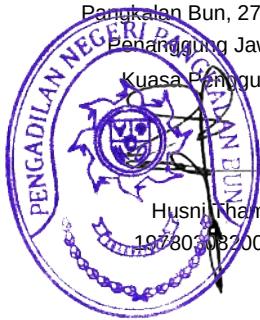
UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099134 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Tgl Data : 27/02/26 12:39 PM
Tanggal : 27/02/26 2:20 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_skel_satker_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL				59,923,950,645		46,562,564,975		45,658,964,975		60,827,550,645

Pangkalan Bun, 27 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Husni Hamrin, ST
197803082009041003



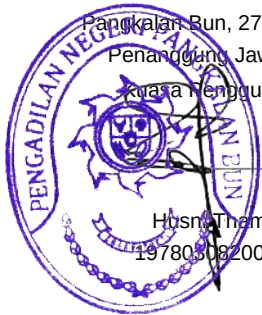
LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

UAPA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099134 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Tgl Data : 27/02/26 12:39 PM
Tanggal : 27/02/26 2:21 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_skel_satker_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

Pangkalan Bun, 27 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



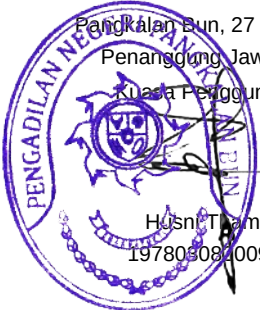
Husni Thamrin, ST
197803082009041003

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099134 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Tgl Data : 27/02/26 12:39 PM
Tgl Cetak : 27/02/26 2:21 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_skel_satker_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		1,025	49,713,200	(32,992,364)	(4,018,343)	(37,010,707)	12,702,493
3050201	MEUBELAIR	-	21	11,921,000	(4,626,300)	(2,304,200)	(6,930,500)	4,990,500
3050204	ALAT PENDINGIN	-	8	1,860,000	(1,860,000)	0	(1,860,000)	0
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	-	320	23,935,000	(23,935,000)	0	(23,935,000)	0
3180102	RAMBU TIDAK BERSUAR	-	676	11,997,200	(2,571,064)	(1,714,143)	(4,285,207)	7,711,993
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		1	100,000	(100,000)	0	(100,000)	0
3050201	MEUBELAIR	-	1	100,000	(100,000)	0	(100,000)	0
JUMLAH			1,026	49,813,200	(33,092,364)	(4,018,343)	(37,110,707)	12,702,493

Pangkalan Bun, 27 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Husni Thamrin, ST
197805084009041003

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099134 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Tgl Data : 27/02/26 12:39 PM
Tgl Cetak : 27/02/26 2:21 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_skel_satker_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	Tanah		33,105	44,490,307,975	0	0	0	44,490,307,975
2010101	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	-	8,590	8,680,241,000	0	0	0	8,680,241,000
2010104	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	-	24,515	35,810,066,975	0	0	0	35,810,066,975
132111	Peralatan dan Mesin		524	2,791,153,201	(2,211,758,201)	(131,456,700)	(2,343,214,901)	447,938,300
3020102	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	-	3	262,514,828	(262,514,828)	0	(262,514,828)	0
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	-	6	63,570,000	(63,570,000)	0	(63,570,000)	0
3020202	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	-	1	3,000,000	(3,000,000)	0	(3,000,000)	0
3050101	MESIN KETIK	-	2	9,000,000	(9,000,000)	0	(9,000,000)	0
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	-	61	120,686,000	(120,686,000)	0	(120,686,000)	0
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	-	11	53,648,100	(50,798,100)	(950,000)	(51,748,100)	1,900,000
3050201	MEUBELAIR	-	202	389,660,000	(250,910,000)	(13,875,000)	(264,785,000)	124,875,000
3050203	ALAT PEMBERSIH	-	1	2,750,000	(2,750,000)	0	(2,750,000)	0
3050204	ALAT PENDINGIN	-	35	299,390,830	(116,781,830)	(25,677,100)	(142,458,930)	156,931,900
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	-	85	242,396,900	(132,385,900)	(21,000,100)	(153,386,000)	89,010,900
3050299	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA	-	3	3,798,000	(3,798,000)	0	(3,798,000)	0
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	-	10	50,948,500	(46,539,200)	(2,860,850)	(49,400,050)	1,548,450
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	-	3	71,830,500	(51,804,800)	(12,083,650)	(63,888,450)	7,942,050
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	-	2	9,150,000	(9,150,000)	0	(9,150,000)	0
3060347	SUMBER TENAGA	-	2	132,800,000	(87,170,000)	(13,280,000)	(100,450,000)	32,350,000
3100101	KOMPUTER JARINGAN	-	3	118,165,000	(118,165,000)	0	(118,165,000)	0
3100102	PERSONAL KOMPUTER	-	51	654,790,120	(621,062,620)	(22,485,000)	(643,547,620)	11,242,500
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	-	35	136,527,833	(95,145,333)	(19,245,000)	(114,390,333)	22,137,500
3100204	PERALATAN JARINGAN	-	8	166,526,590	(166,526,590)	0	(166,526,590)	0
133111	Gedung dan Bangunan		15	13,521,581,000	(9,278,960,672)	(1,443,399,156)	(10,722,359,828)	2,799,221,172
4010101	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	-	0	0	(8,690,142,587)	8,690,142,587	0	0
4010108	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	-	1	212,523,000	(31,878,450)	(4,250,460)	(36,128,910)	176,394,090
4010111	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	-	1	196,344,000	0	(1,963,440)	(1,963,440)	194,380,560
4010113	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	-	1	80,940,000	0	(809,400)	(809,400)	80,130,600
4010124	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	-	2	10,044,409,000	0	(10,042,308,705)	(10,042,308,705)	2,100,295
4010201	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	-	4	1,270,707,000	(350,940,675)	(49,876,578)	(400,817,253)	869,889,747
4010202	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	-	6	1,716,658,000	(205,998,960)	(34,333,160)	(240,332,120)	1,476,325,880
135121	Aset Tetap Lainnya		4,179	12,468,469	0	0	0	12,468,469
6010101	BUKU	-	4,179	12,468,469	0	0	0	12,468,469
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		5	12,040,000	(12,040,000)	0	(12,040,000)	0
3020302	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	-	1	9,975,000	(9,975,000)	0	(9,975,000)	0
3050201	MEUBELAIR	-	4	2,065,000	(2,065,000)	0	(2,065,000)	0
JUMLAH			37,828	60,827,550,645	(11,502,758,873)	(1,574,855,856)	(13,077,614,729)	47,749,935,916



Pangkalan Bun, 27 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPB

Kasa Pengguna Barang

Husni Tamrin, ST

197803082009041003